

VOX POPULI

Volume 4 Nomor 2 Desember 2021

ISSN 2087-3360 eISSN 2714-7657

POLITIK DAN HUKUM

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019

Wahyuni
57-68

Hak dan Keterwakilan Politik dalam Arena Politik Indonesia

M. Teguh Setyadi Bahtiar, Fadlan Akbar, Febrianto Syam
69-79

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Lorent Tombi, Muhtar, Arifin
80-94

Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

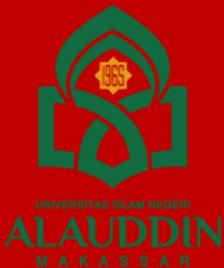
Barik Ramadhani P.
95-108

Perempuan dan Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Covid-19

Astri Nugrayanti A., Anggriani Alamsyah,
109-118

Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme

Yusti Ramadhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith
119-130



Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan

Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme

Yusti Ramdhani, Zulfiani, Reskiyanti Nurdin, Awal Muqsith

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: yusti.ramadhani77@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memaparkan temuan survei terkait persepsi mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar tentang moderasi beragama sekaligus melacak sejauhmana potensi radikalisme tumbuh di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Kesimpulannya bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh informasi mengenai radikalisme bukan dari kampus, namun informasi tersebut dapat disaring dengan pembuktian bahwa sebagian besar tidak ingin melakukan kekerasan karena dianggap dapat merusak citra Islam. Namun demikian, sebagian kecilnya masih menyimpan potensi radikalisme karena untuk kriteria pemimpin dan konsep negara ideal menginginkan sistem khilafah yang dipimpin oleh khalifah.

Kata Kunci :

Moderasi, Toleransi, Radikalisme

PENDAHULUAN

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.¹ Selanjutnya adalah Demokrasi Pancasila sampai hari ini masih menjadi sistem politik yang eksis diterapkan di Indonesia walaupun pada dasarnya Demokrasi Pancasila ini masih belum bersifat final

sehingga tidak menutup kemungkinan dapat bertransisi lagi menuju sistem yang baru. Demokrasi hadir untuk menaungi semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama dan ras. Suatu keharusan yang membuat moderasi muncul di Indonesia sebagai tiang perdamaian dan keharmonisan bernegara adalah karena Indonesia merupakan negara yang plural dan multikultural. Ada banyak suku, agama, ras, bahasa, etnis dan budaya yang tidak bisa dihilangkan.

Perbedaan, keragaman ataupun kemajemukan adalah sebuah anugerah yang memiliki esensi estetis, humanis dan harmonis apabila dielaborasi dengan baik. Dalam

¹Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 108.

suatu negara sudah mutlak dibersamai oleh perbedaan, keberagaman ataupun kemajemukan yang berimplikasi di berbagai aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, agama, pendidikan, pemerintahan, sosial dan budaya. Tak dapat dinafikan bahwa dengan adanya keragaman tersebut berpotensi dan dapat memicu munculnya sikap intoleran, ekstrimisme, radikalisme, dan Islamophobia.

Keragaman merupakan pemberian dari Allah yang tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan, akan tetapi harus diterima sebagai takdir dari Allah. Untuk itu, setiap warga bangsa sudah selayaknya mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan. Terkait hal tersebut, banyak sekali dalil yang membahas tentang moderasi di antaranya dalam Q.S. Al-Hujurat 49 : 13; *“Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”* Seharusnya, perbedaan dan keberagaman menjadi jembatan untuk mengantarkan suatu bangsa ke arah yang lebih maju. Namun, fenomena yang terjadi justru cenderung tidak meleak esensi di balik perbedaan dan keberagaman. Hal ini disebabkan oleh sedikit banyaknya individu yang membentuk kelompok berlandaskan rasa “dipinggirkan” atau merasa sebagai kaum minoritas yang sebenarnya berasal dari kelompok mayoritas yang merasa diperlakukan secara tidak adil.

Munculnya perasaan tersebut membuat mereka membentuk kelompok mengatas-

namakan agama, misalnya Islam. Kelompok-kelompok ini memiliki ciri khas gerakan masing-masing mengingat latar belakang dan kepentingan yang dibawa berbeda-beda. Akibatnya, memunculkan sekat-sekat dalam beragama maupun berislam sehingga tidak sedikit yang merasa kehilangan eksistensi persatuan dan kesatuan yang menjadi inti utama dalam berbangsa, bernegara maupun beragama. Tak dapat dinafikan bahwa kelompok ini kerap kali disebut sebagai “Kelompok Islam Radikal” oleh karena pemahaman beragama yang fanatik dan ekstrim memandang segala hal. Sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Wahid Foundation (2016) bahwa radikalisme adalah sikap atau tindakan yang mengatasnamakan agama yang tidak sejalan dengan dasar atau prinsip dasar kehidupan berbangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan terbuka terhadap sesama warga yang majemuk yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi atau yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Mirisnya, bukan hanya memandang kelompok non-Islam (minoritas) sebagai kesalahan, namun sesama umat Islam juga turut menjadi bahan pengerdilan apabila tidak sepaham dengan mereka dalam menafsirkan ajaran Islam. Mereka cenderung merasa paling benar, paling tahu dan paling pantas dalam berislam ketimbang orang-orang di luar kelompok mereka sehingga tak jarang kita menemukan fenomena “pengkafiran” semena-mena melalui lisan maupun tindakan di lingkungan masyarakat.

Tulisan ini bertujuan menguraikan lebih spesifik bagaimana kelompok Islam radikal berimplikasi di dunia pendidikan khususnya pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar. Sehingga penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi moderasi beragama dan potensi radikalisme di kalangan pelajar dan pengajar karena dalam lingkup pendidikan perbedaan keyakinan masih menjadi perbincangan sentral yang penting untuk didapatkan titik temunya. Mengingat fenomena secara historis yakni tindakan kekerasan beragama seperti bom bunuh diri yang dilakukan salah satu mahasiswa di PTKIN Indonesia beberapa tahun silam. Selain itu, semakin menjadi-jadinya kelompok yang mengidentikkan dirinya dengan simbol-simbol keislaman seperti cadar, cingkrang, jenggot dan lain sebagainya membuat gerakan secara eksklusif di lingkungan kampus semakin menyempurnakan sekat-sekat dalam berislam sehingga membuat PTKIN tidak jarang dilihat sebagai “sarang” intoleransi oleh masyarakat. Untuk itu, adalah penting bagi sivitas akademik dan mahasiswa berkolaborasi untuk mendeteksi bibit-bibit radikalisme di ranah pendidikan serta menanamkan moderasi beragama melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan birokrasi maupun organisasi internal kampus.

TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang moderasi beragama tentu tidak bisa terlepas dengan istilah radikalisme, islamisme, populisme, mode-

rnisasi serta pendekatan-pendekatan dalam upaya menanamkan sikap moderat guna menangkal radikalisme. Ulfatul Husna dalam penelitiannya tentang *Moderasi Beragama Di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo Tahun 2020*,² ia berpendapat bahwa semua agama membawa misi kedamaian dan keselarasan hidup, bukan hanya untuk sesama manusia, juga untuk hubungan manusia dengan Tuhan dan seluruh makhluk di dunia ini. Misi itu dalam terminologi Islam disebut rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi misi baik itu tidak selalu artikulatif. Memilih menjadi moderat, liberal dan radikal sebenarnya tidak salah, akan tetapi menjadi problematika ketika pilihan itu berujung menjadi perilaku eksklusif, intoleran dan kekerasan. Sepanjang perjalanan sejarah Islam di Indonesia selama ini menampilkan wajah kontradiktif dengan misi Islam yang sesungguhnya.

Rabiah Al Adawiyah, Clara Ignatia Tobing dan Oti Handayani dalam penelitiannya *Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleransi terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat Tahun 2020*.³ Mereka melihat bahwa rata-rata siswa Sekolah Menengah Atas memiliki pemahaman agama yang sudah baik. Akan

²Ulfatul Husna, “Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo : Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme”, *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

³Rabiah Al Adawiyah, Clara Ignatia Tobing & Oti Handayani, “Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleransi terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat Tahun 2020”, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 161-183.

tetapi, tingkat pemahaman ini tidak diikuti oleh pemahaman moderasi beragama yang sama. Hasil olah data menunjukkan siswa-siswa tersebut masih memahami tingkat pemahaman moderasi yang masih berada di bawah rata-rata. Pemahaman moderasi yang rendah ini turut berhubungan dengan toleransi antar umat beragama.

Hasil data menunjukkan bahwa kesadaran toleransi siswa di 3 kota besar Jawa Barat yaitu Bandung, Depok dan Bogor masih buruk. Pendidikan agama dan moderasi dalam beragama memiliki pengaruh terhadap toleransi antar umat beragama. Semakin baik tingkat pendidikan agama Islam seorang siswa maka berpeluang memiliki toleransi antar umat beragama yang lebih baik. Selain itu, semakin baik tingkat moderasi dalam beragama seorang siswa maka berpeluang lebih toleran terhadap umat beragama lainnya.

Sebagai pembeda, tulisan ini mencoba memaparkan dan menggali bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar terkait Indonesia sebagai negara Pancasila yang menganut sistem demokrasi yang dikomparasikan dengan persepsi terkait penegakan syariat Islam melalui negara khilafa. Dengan diangkatnya dua garis besar tersebut diharapkan mampu mendapatkan titik terang mengenai persepsi moderasi beragama di kalangan mahasiswa serta dapat mendeteksi seberapa besar potensi radikalisme.

Adapun yang melatarbelakangi pengambilan tema persepsi moderasi beragama

dan potensi radikalisme karena banyaknya pandangan mulai dari masyarakat awam hingga para akademisi bahwa PTKIN kadang kala menjadi “*sarang*” intoleransi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan paradigma post-positivis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori menggunakan strategi eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik.⁴ Penelitian kuantitatif ini menggunakan teknik survei yaitu penelitian yang tidak melakukan perubahan tanpa ada perlakuan khusus terhadap variabel-variabel yang diteliti.⁵ Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah persepsi moderasi beragama mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar.

PEMBAHASAN

Sumber Informasi Tentang Radikalisme

Pemahaman yang mengarah pada munculnya suatu gerakan biasanya diawali dengan adanya pemantik berupa informasi sehingga seseorang akan mencari tahu lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi. Di Indonesia sudah tidak asing dengan istilah radikalisme yaitu gerakan

⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 28.

⁵Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5.

yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.⁶

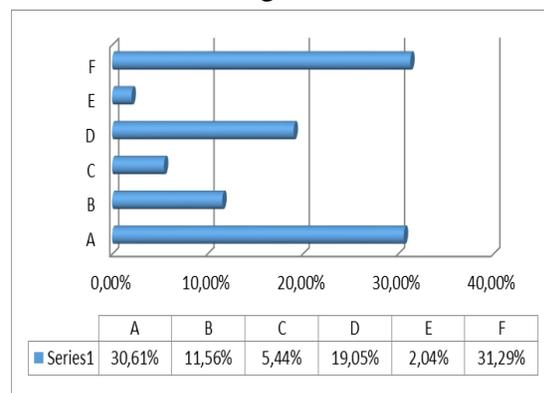
Syaiful Arif menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di “Islam kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering tersesat pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh dengan baik.⁷ Namun, yang terjadi pada masa sekarang ini justru kurang relevan dengan yang dikemukakan oleh Syaiful Arif melihat peristiwa beberapa tahun silam membuat melebarnya sayap-sayap radikal-isme tidak menutup kemungkinan juga akan merambah sampai di ranah pendidikan khususnya di PTKIN yang sering dianggap sebagai “sarang” intoleransi bahkan “sarang” bibit-bibit radikalisme. Hal ini kerap kali dilabelkan karena melihat secara historis kekerasan beragama seperti bom bunuh diri pernah dilakukan oleh salah seorang mahasiswa di salah satu PTKIN Indonesia. Ditambah lagi bahwa di PTKIN terdapat banyak sekali simbol-simbol berupa pengindentikan diri sebagai seorang muslim yang *kaffah* seperti cadar, cingkrang, jenggot dan lain

sebagainya tidak jarang dianggap sebagai bibit-bibit radikalisme karena masyarakat awam melihat *fashion* dari semua pelaku radikal adalah sama dari simbol tersebut.

Mengetahui informasi mengenai radikalisme sebenarnya penting bagi setiap individu sebagai perisai untuk melindungi diri agar tidak terjerumus ke dalam gerakan tersebut. Namun, bahayanya jika informasi yang diperoleh justru berujung pada pencarian beralih kebenaran yang akhirnya masuk dalam kelompok-kelompok radikal kemudian berhasil terbujuk oleh doktrin-doktrin yang berimplikasi pada aksi gerakan kekerasan beragama. Berikut ini adalah organisasi-organisasi keagamaan yang sering melakukan kekerasan atas nama agama yang diketahui oleh sejumlah responden.

Grafik 1

Jawaban responden mengenai nama organisasi keagamaan yang diketahui sering melakukan kekerasan atas nama agama



Keterangan:

A: Mujahidin Indonesia Timur Poso

B: Jemaah Ansharut Daulah

C: Jemaah Islamiyah

D: FPI

E: Lainnya

F: TT/TJ

⁶Syahril, dkk., *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020), h. 3.

⁷Sugeng Suharto, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Ponorogo: REATIV, 2019).

Berdasarkan grafik di atas dapat diidentifikasi bahwa organisasi yang sering melakukan kekerasan atas nama agama yang diketahui oleh mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar didominasi oleh Mujahidin Indonesia Timur Poso dengan persentasi 30,61%. Tak heran jika Mujahidin Indonesia Timur Poso ini banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya maha-siswa yang memiliki rasa ingin tahu cukup besar karena organisasi ini adalah organisasi yang sudah banyak menelan korban jiwa dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Awalnya mereka hanya beroperasi di Sulawesi Tengah saja namun seiring berjalannya waktu mereka meng-ancam untuk melakukan teror di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini dipimpin oleh Santoso dan memiliki jejaring yang luas baik sesama organisasi Islam dan juga organisasi yang dianggap teroris seperti ISIS. Selanjutnya, Front Pembela Islam (FPI) dengan persentase sebesar 19,05%. FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab tercatat paling kontroversial di antara ormas Islam lainnya. Masyarakat melihat kelompok FPI ini merupakan ormas Islam radikal, hal ini terlihat dari pengimplementasian gerakan yang mereka lakukan. Masyarakat menyoroti aksi vigilantisme seperti melakukan *sweeping* dan merusak fasilitas di bar, diskotik, tempat lokalisasi dan tempat hiburan lainnya. FPI ini menjadi organisasi yang sangat andil dalam aksi bela Islam.

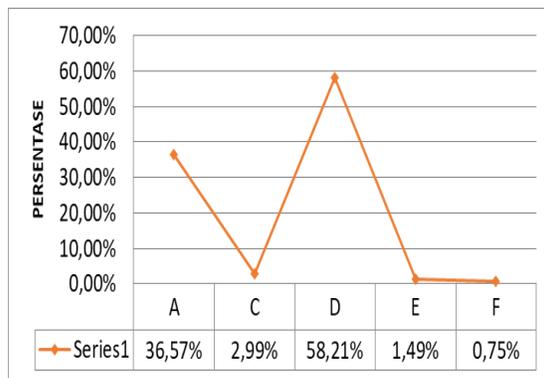
Jemaah Ansharut Daulah dengan persentase sebesar 11,56% juga tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Organisasi ini termasuk dalam kelompok militan di Indonesia yang telah melakukan pengeboman di Surabaya pada tahun 2018 dan baru-baru ini kembali melancarkan aksinya dengan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada tahun 2021. Kelompok ini juga terjaring dengan ISIS serta menjadikan kaum milenial sebagai target perekrutan dan menjalankan aksi terror. Selanjutnya, Jemaah Islamiyah dengan persentase sebesar 5,44% tergolong sebagai organisasi yang minim diketahui oleh mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar. Namun, sebenarnya Jemaah Islamiyah ini sudah ada di Indonesia sebagai organisasi terlarang dan sering ditindaklanjuti oleh aparat keamanan negara akibat gerakan militan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yakni mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. Jemaah Ansharut Daulah dan Jemaah Islamiyah ini mulai merab-raba kaum milenial dan melibatkan perempuan untuk melakukan aksi radikal.

Sementara itu, sangat penting untuk diketahui dimanakah para mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar ini mendapatkan informasi mengenai isu radikalisme sekaligus organisasi-organisasi yang dianggap radikal seperti yang telah dijelaskan di atas. Berikut adalah grafik yang menunjukkan sumber informasi radikalisme yang dimaksud.

Grafik 2

Jawaban responden mengenai sumber informasi nama tokoh dan peristiwa kekerasan atas nama agama

**Keterangan:**

A: Media massa

B: Dari Kampus

C: Dari lingkungan tempat tinggal

D: Media online

E: Teman

F: Keluarga

Berdasarkan grafik di atas dapat diidentifikasi bahwa sumber informasi mengenai radikalisme paling banyak ditemukan dari media online dengan persentase sebesar 58,21% dan media massa sebesar 36,57%. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat semua orang mampu mendapatkan apa yang ingin diketahui semakin mudah.

Media online dan media massa menjadi sangat andil dalam memperkaya khazanah pengetahuan setiap orang khususnya mahasiswa. Namun, sangat disayangkan bahwa di era sekarang ini media online dan media massa menjadi kasur empuk untuk menggiring opini demi mewujudkan kepentingan individual atau kelompok yang merugikan di segala aspek kehidupan. Adapun yang sering kali dijumpai yaitu pengekspresian paham berislam yang secara tidak langsung mengkerdikan orang-orang di luar kelompoknya baik secara lisan maupun tindakan. Dan yang

paling eksis dengan menggunakan media online sebagai wahana menyentil individu atau kelompok tertentu yang tidak se-paham dengan mereka.

Selanjutnya dari lingkungan tempat tinggal dengan persentase 2,99% dan dari keluarga dengan persentase sebesar 1,49% sedangkan dari kampus 0%. Berarti dapat disimpulkan bahwa radikalisme secara garis besar berasal dari dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh dari mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar faktor eksternal paling berpengaruh terkait informasi mengenai radikalisme yaitu dari media online dan media massa sehingga sangat perlunya edukasi penyaringan dalam menyerap informasi-informasi agar tidak mudah terprovokasi apalagi sampai ter-doktrin melakukan gerakan teror atau radikal.

Selanjutnya, faktor intenal yang berasal dari keluarga sangat minim sehingga peran keluarga dapat disem-purnakan dengan lebih memberikan pen-didikan beragama secara moderat dan menanamkan sikap toleransi sedini mung-kin agar generasi-generasi bangsa dapat berkompromi dan menerima kemajemukan dengan baik. Dan lebih mengejutkan ternyata tidak ada satupun responden yang mendapatkan informasi radikalisme dari kampus artinya 0%. Sehingga hal ini dapat menjadi acuan untuk mebantah asumsi masyarakat bahwa PTKIN bukan pusat radikalisme.

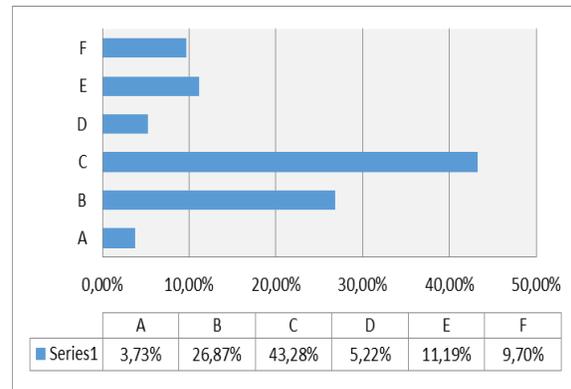
Kekerasan dalam Beragama

Menurut pandangan ulama Mesir, Yusuf al-Qardawi umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (moderat). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya.⁸ Keragaman merupakan pemberian dari Allah yang tidak dapat dinegosiasikan, namun harus diterima sebagai takdir dari Allah. Untuk itu, setiap warga bangsa sudah selayaknya mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan.

Hal tersebut dishahikan dalam Q.S. Al-Hujurat 49: Ayat 13 “*Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*” Dari ayat tersebut sudah mengandung makna bahwa kehidupan ini memang tidak akan lepas dari perbedaan, keragaman dan kemajemukan untuk saling melengkapi, saling memanusikan serta menyatukan satu sama lain.

Berikut ini adalah data yang diperoleh terkait bagaimana mahasiswa menanggapi kekerasan dalam beragama seperti bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama.

Grafik 3
Tanggapan responden terhadap bom bunuh diri atas nama agama



Keterangan:

- A:Perbuatan dalam rangka membela harga diri umat Islam, karena itu termasuk bagian dari Jihad
- B:Perbuatan yang merusak nama baik Islam
- C:Perbuatan sia-sai
- D:Ingin menimbulkan rasa takut kepada masyarakat
- E:Bentuk teror kepada rezim pemerintah yang dianggap zalim ke umat Islam
- F:TT/TJ

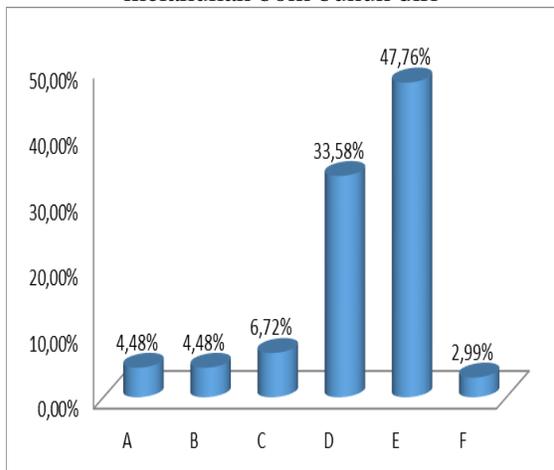
Dari grafik di atas dapat diidentifikasi bahwa mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar cukup baik dalam menanggapi kekerasan dalam beragama serta dapat dikatakan bahwa mereka cenderung tidak sepakat dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sehingga diperoleh sebesar 43,28% yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah perbuatan sia-sia, 26,87% yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah perbuatan yang merusak nama baik Islam serta 5,22% yang mengatakan bahwa bom bunuh diri adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada masyarakat. Hal ini merupakan titik terang bahwa mereka kontra dengan gerakan bom bunuh diri.

Berikutnya, sebesar 3,73% yang justru menganggap bahwa bom bunuh diri merupakan perbuatan dalam rangka mem-

⁸Dapartemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), h. 20-22.

bela harga diri umat Islam karena itu termasuk bagian dari jihad. Dan sebesar 11,19% yang juga setuju bahwa bom bunuh diri merupakan bentuk teror kepada pemerintah yang zalim kepada umat Islam. Hal ini membuktikan bahwa dari banyaknya yang tidak sepakat dengan kekerasan dalam beragama namun tetap saja ada segelintir mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar yang terdeteksi pro terhadap hal tersebut. Berikutnya ini adalah penyajian data mengenai tanggapan responden ketika diajak melakukan bom bunuh diri.

Grafik 4
Tanggapan responden tentang ajakan melakukan bom bunuh diri



Keterangan:

- A: Sangat ikut bersedia
- B: Bersedia
- C: Ragu-ragu
- D: Tidak ikut bersedia
- E: Sangat tidak ikut bersedia
- F: TT/TJ

Dari data di atas dapat diidentifikasi bahwa untuk melakukan kekerasan dalam beragama seperti bom bunuh diri walaupun diiming-iming mati syahid sebagian besar mahasiswa FKIK UIN

Alauddin Makassar tetap tidak ingin merelakan diri melakukan perbuatan tercela tersebut. Hal ini dibuktikan dengan persentase mahasiswa yang sangat tidak ikut bersedia dengan persentase sebesar 47,76% dan yang tidak ikut bersedia sebesar 33,58%. Tetapi mirisnya bahwa data yang diperoleh mendeteksi ada segelintir mahasiswa yang cukup antusias jika diajak melakukan bom bunuh diri dengan persentase masing-masing 4,48% antara yang sangat ikut bersedia dengan yang bersedia. Hal ini penting untuk diwanti-wanti dan dilakukan bimbingan atau edukasi sebelum menjadi antek para kelompok radikal. Karena memiliki peluang yang besar jika mereka sudah bersedia atau bahkan sangat bersedia kemudian mendapatkan doktrin maka akan sangat mudah untuk terjerumus dalam gerakan radikal. Mahasiswa yang menjawab ragu-ragu dengan persentase sebesar 6,72% perlu dikawal karena jawaban ragu-ragu berarti masih menyimpan rasa pro terhadap bom bunuh diri tersebut sehingga sangat penting untuk mengubah keraguan itu menjadi tidak sepakat atas kekerasan dalam beragama.

Kriteria Pemimpin Yang Ideal

Berbicara mengenai kriteria, tentu setiap individu mempunyai kriteria masing-masing dalam menentukan pilihan terbaik khususnya dalam memilih pemimpin atau kepala negara yang akan memimpin selama beberapa tahun. Di Indonesia pemimpin negara adalah presiden yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi syarat

sebagai pemilih tanpa memandang suku, agama dan ras.

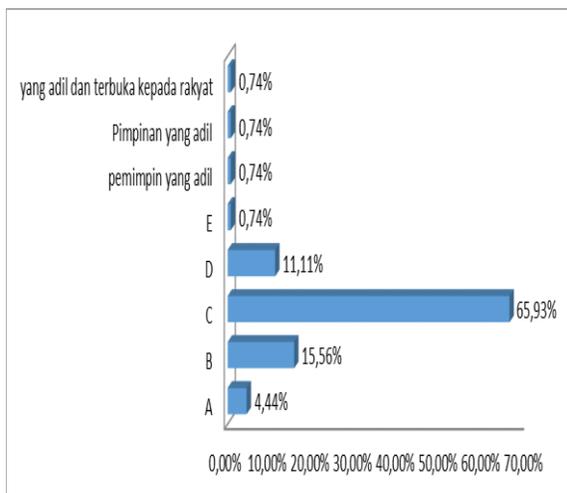
Munculnya kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah membuat munculnya gerakan militan yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat karena biasanya menelan korban jiwa. Sebagian dari kelompok Islam radikal ini menginginkan pemimpin negara adalah khalifah yang diangkat melalui pembai'atan. Khalifah adalah istilah bagi pemimpin terbesar umat Islam namun sangat tidak tepat jika diterapkan di negara yang plural seperti Indonesia. Hal ini juga tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang hadir untuk merangkul semua perbedaan dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Berikut ini tanggapan responden tentang ciri-ciri sosok pemimpin yang ideal di Indonesia.

- B: Pemimpin yang adil meski tidak beragama Islam
- C: Pemimpin yang adli dan beragama Islam
- D: TT/TJ
- E: Lainnya

Berdasarkan data di atas dapat diidentifikasi bahwa walaupun sebagian besar mahasiswa FKIK UIN Alauddin tidak sepakat dengan adanya kekerasan dalam beragama namun mereka cenderung menginginkan sosok pemimpin yang harus beragama Islam sebagai pemimpin yang ideal. Hal ini dibenarkan dengan perolehan data persentase sebesar 65,93% yang menginginkan sosok pemimpin yang adil dan beragama Islam. Ditambah lagi persentase sebesar 4,44% yang menginginkan pemimpin yang beragama Islam. Sedangkan salah satu syarat seorang khalifah harus beragama Islam artinya sosok khalifah sudah cukup relevan sebagai pemimpin yang ideal di Indonesia menurut sebagian besar mahasiswa FKIK UIN Alauddin. Berikutnya, yang menyatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang ideal di Indonesia adalah yang tidak mestik beragama Islam namun adil hanya memperoleh persentase sebesar 15,56%. Serta jawaban lainnya seperti pemimpin atau pimpinan yang adil dan pemimpin yang terbuka kepada rakyat masing masing memperoleh persentase sebesar 0,74%. Kesimpulannya adalah hanya sedikit yang mampu berkompromi dengan kemajemukan ketika diperhadapkan dengan pilihan dari sisi beragama. Padahal kemampuan seseorang dalam memimpin tidak bisa diukur dari keyakinannya sebab tidak sedikit muslim yang tidak memiliki

Grafik 5

Tanggapan responden tentang ciri-ciri sosok pemimpin yang ideal di Indonesia



Keterangan:

A: Pimpinan yang beragama Islam

akhlak yang baik serta tidak amanah dengan tanggung jawab yang diberikan.

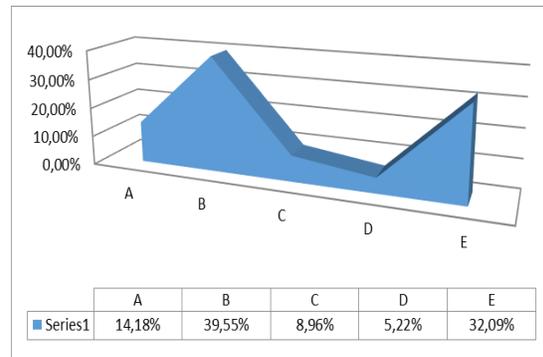
Konsep Negara Ideal

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dan berlandaskan ideologi Pancasila. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara plural sehingga dibutuhkan sistem dan ideologi yang mampu merangkul segala perbedaan, keragaman ataupun kemajemukan.

Munculnya keegoisan dari kelompok-kelompok Islam radikal yang menginginkan negara khilafah yang dipimpin oleh khalifah adalah suatu bentuk keresahan yang harus dipecahkan agar tidak berimplikasi pada suatu gerakan militan yang berpotensi menghancurkan segala aspek kehidupan dalam negara plural. Negara khilafah atau sering disebut sebagai negara Islam menurut kelompok-kelompok tersebut adalah negara yang tidak dihuni oleh satupun orang non-islam agar dapat mencapai keberislaman secara kaffah. Berikut ini adalah tanggapan responden apabila Indonesia menerapkan sistem khilafah apakah mampu memberikan kesejahteraan.

Grafik 7

Tanggapan tersponden tentang jika Indonesia menerapkan system khilafah mampukah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia



Keterangan:

A: Sangat setuju

B: Setuju

C: Ragu-ragu

D: Tidak setuju

E: Sangat tidak setuju

Berdasarkan data di atas dapat diidentifikasi bahwa yang mendominasi adalah mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar menginginkan Indonesia berubah menjadi sistem khilafah guna untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Persentase yang diperoleh sebesar 39,55% sangat setuju dan 14,18% yang setuju sedangkan yang sangat tidak setuju sebesar 32,09% dan didukung oleh yang tidak setuju sebesar 5,22%. Namun, yang masih ragu-ragu sebesar 8,96% sehingga jika dikalkulasikan dalam kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju maka akan terlihat berkontestasi dengan yang sangat setujuan yang setuju. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jawaban ragu-ragu bisa saja mengarah pada sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian pentingnya sosialisasi terkait persatuan dan kesatuan melalui toleransi dan moderasi dalam menerima perbedaan, keberagaman dan kemajemukan agar Indonesia tidak terpecah belah.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh bahwa sebagian besar mahasiswa memperoleh informasi mengenai radikalisme bukan dari kampus melainkan dari media online, media massa serta sebagian kecil dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Informasi yang diperoleh ternyata dapat disaring dengan baik karena sebagian besar tidak ingin mengimplementasikan kekerasan beragama atas nama Islam karena dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan juga merusak ajaran Islam. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga tidak ingin melakukan bom bunuh diri walaupun ada segelintir mahasiswa yang cukup antusias bersedia melakukannya. Dengan demikian, sangat dikhawatirkan apabila segelintir mahasiswa ini dapat terjerumus ke dalam kelompok Islam radikal kemudian melancarkan aksinya dengan iming-iming mati syahid. Selanjutnya untuk kriteria pemimpin dan konsep negara ideal sebagian besar menginginkan sistem khilafah yang dipimpin oleh khalifah. Sehingga hal ini bisa dibilang mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar belum mampu menerima dan merangkul kemungkinan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sehingga penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan moderasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dapartemen Agama RI, *Moderasi Islam* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2021), h. 20-22.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Rabiah Al Adawiyah, Clara Ignatia Tobing & Oti Handayani, "Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleransi terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat Tahun 2020", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 161-183.
- Sugeng Suharto, *Kebijakan Pemerintah Sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional* (Ponorogo: REATIV, 2019).
- Syahril, dkk., *Literasi Paham Radikalisme di Indonesia* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020).
- Ulfatul Husna, "Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung-Sidoarjo : Suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme", *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).